

Judul : Surat Pemerintah Aceh ke PBB menuai polemik
Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Surat Pemerintah Aceh Ke PBB Menuai Polemik

Sejak Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dilanda bencana dan menimbulkan korban jiwa hingga ratusan orang, Pemerintah belum juga menetapkan bencana nasional. Pemerintah Pusat menganggap bencana Sumatera bisa ditangani tanpa bantuan negara lain. Karenanya, Pemerintah all out dalam memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan kepada masyarakat yang menjadi korban. Tetapi, Senin kemarin, Pemerintah Aceh meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu menangani pasca bencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong.

*Pemerintah Aceh secara resmi

telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Senin. Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF). "Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," ujarnya. Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh. Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara,

Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh. "Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini," demikian Muhammad MTA. Keputusan mengirimkan surat ke PBB menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Ada yang setuju,

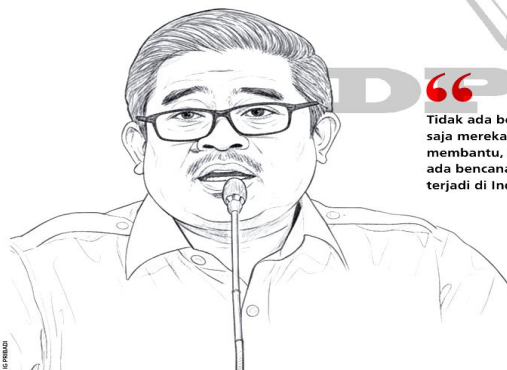
ada juga yang keberatan. Mantan Dirjen Otda Kemendagri, Soni Soemarsono tak mempermasalahkan jika Pemda Aceh mengirimkan surat ke PBB. Selama ini, lembaga yang dikirim surat sudah beroperasi di Indonesia. "Tidak ada masalah dengan mengirimkan surat ke PBB," ujar dia. Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan seharusnya Pemda Aceh berkoordinasi terlebih dahulu ke Pemerintah. "Kita bernegara itu punya aturan," katanya. Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Zulfikar Arse Sadikin dan Soni Soemarsono terkait keputusan Pemda Aceh yang mengirimkan surat ke PBB.

SONI SOEMARSONO, Mantan Dirjen Otda Kemendagri

ZULFIKAR ARSE SADIKIN, Wakil Ketua Komisi II DPR

Kalau Tujuannya Baik, Pemerintah Terima

Harusnya Koordinasi Dulu Dengan Pusat



Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat ke PBB untuk meminta bantuan atas bencana Aceh. Apa respons Anda?

Begini, UNDP dan UNICEF itu kan posisinya di bawah PBB. Dan UNDP dan UNICEF sudah lama bekerjasama dengan Indonesia. Bahkan, lembaga PBB ini juga sudah beroperasi lama di Indonesia. Seperti di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jabar dan daerah lainnya.

Dan misi serta visinya juga untuk pembangunan yang ada di Indonesia, ada ataupun dan tidak ada bencana.

Jadi, menurut Anda wajar saja jika lembaga PBB memberikan bantuan?

Tidak ada bencana saja mereka membantu, apalagi ada bencana yang terjadi di Indonesia. Dan bantuan dari UNDP dan UNICEF untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang terjadi bencana.

Jadi, sangat wajar saja jika mereka memberikan bantuan dan sumbangan-nya kepada bencana di Aceh dan daerah lain yang mengalami bencana.

Terkait surat dari Pemerintah Aceh ke PBB. Bagaimana?

Prinsipnya, ada atau tidak ada surat dari Pemerintah Aceh, mereka bisa memberikan bantuan. Dan kalau pun ada surat hanya administrasi saja, buat legalitas.

Menurut Anda, keputusan Pemerintah Aceh mengirimkan surat tidak masalah, ya?

Kesimpulannya tidak ada masalah dengan mengirimkan surat ke PBB. Apalagi, Indonesia adalah anggota PBB yang akan membantu jika ada masalah dan kesulitan.

Dan surat yang dikirimkan Pemerintah Aceh tidak ada yang salah.

Tetapi, Pemerintah kesannya kurang nyaman dengan adanya surat tersebut?

Saya kira Pemerintah Pusat harus *well-come* dan menerima saja jika surat dikirim ke lembaga PBB. Tapi, ngawannya juga baik yakin membantu korban bencana. ■REN

Tidak ada bencana saja mereka membantu, apalagi ada bencana yang terjadi di Indonesia.

Jika memang kita bisa melakukan sendiri, tanpa bantuan negara lain itu lebih baik.



Kemarin, Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat ke lembaga PBB untuk meminta bantuan. Apa tanggapan Anda?

Sebenarnya, kita sebagai suatu bangsa itu punya yang namanya kedaulatan. Dan kedaulatan kita punya makna. Kalau memang kita mampu dan kita bisa melakukan sendiri itu lebih baik dan lebih bagus.

Maksudnya, tanpa bantuan luar negeri?

Jika memang kita bisa melakukan sendiri, tanpa bantuan negara lain itu lebih baik. Hingga saat ini masyarakat Indonesia juga ikut berpartisipasi dan membantu berbagai bencana terma-

suk di Aceh. Artinya, Pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini masih fokus dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.

Menurut Anda, apakah boleh meminta bantuan dari negara lain? Edeh minta bantuan, tapi hanya pelengkap saja bukan yang utama. Karena hingga saat ini Pemerintah Pusat masih bisa menangani dengan baik.

Prinsipnya, selama kita bisa menangani sendiri, maka lebih baik sendiri.

Bagaimana dengan surat yang dikirimkan oleh Pemerintah Aceh

kepada PBB? Kalau urusan luar negeri harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, apalagi kepala daerah itu harus lapor serta dapat persetujuan atau tidak.

Dearah tidak bisa serta merta men-

gabaikan Pemerintah Pusat dalam hal kebijakan luar negeri. Dan perlu diingat kalau kita punya aturan yang harus ditaati dan dijalani oleh semua pihak.

Ke depannya apa yang harus dilakukan?

Dalam konteks ini, saya kira Pemda harus berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan apapun. ■REN